

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu di Indonesia saat ini semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir ini adalah akuntabilitas keuangan publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah, pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah daerah harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, selain itu pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan secara jelas. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan dan Hertianti, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah harus mengelola keuangan daerah secara tepat waktu dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap.

Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan suatu penyajian informasi keuangan yang utuh dalam laporan keuangan. Pemerintah sebagai pengelola dana masyarakat harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami serta mempublikasikannya kepada publik.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah harus disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang

berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dan mudah diakses oleh publik akan berdampak terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebaliknya jika penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Adapun peneliti terdahulu Nurlaili (2016) dan Peggy Sande (2013) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yuni Sastra (2013) pada BKD Kota Medan, yang mana hasil penelitiannya menyatakan Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Frans (2011) di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Somasir, Kabupaten Humbang dan Kabupaten Samosir, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Flores, dengan ibu kotanya Larantuka dengan jumlah penduduknya sebanyak 294.143 jiwa. Kabupaten Flores Timur memiliki 19 kecamatan yang tersebar di 3 (tiga) pulau besar, yakni pulau Flores bagian timur, pulau Adonara dan pulau Solor. Secara umum kondisi ini memiliki pengaruh terhadap proses pembangunan daerah, sehingga perlu adanya perhatian serius baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau *baseline data* yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah unit kerja pada suatu pemerintahan Kabupaten/ Kota yang bertugas antara lain, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BKAD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Namun fakta yang ditemukan pada OPD ini bahwa laporan keuangan OPD belum tepat waktu, masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih terbatasnya kapasitas keuangan dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan kepala daerah serta transparansi pengelolaan pemerintahan belum memadai.

Berdasarkan perbedaan hasil beberapa penelitian dan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai **“PENGARUH AKSESIBILITAS DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi persoalan penelitian adalah

1. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

1. Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi Fakultas Ekonomi khusus jalur minat Akuntansi Sektor Publik dalam rangka menimba wawasan berpikir khusus bagi mahasiswa.
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau penelitian yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep Akuntansi Sektor Publik terutama mengenai aksesibilitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi masukan dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.